

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN UPAH ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

**(Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo
Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

SITI NUR KHOLIFAH

NPM : 1421030142

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN UPAH ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

**(Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo
Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

SITI NUR KHOLIFAH

NPM : 1421030142

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439/2018 M**

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN UPAH ANTARA
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi pada buruh tani di Dusun
Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way
Kanan)

Oleh:
Siti Nur Kholifah

Sewa-menyewa tenaga manusia merupakan salah satu bagian dari hukum mu'amalah. Sebagai contoh, sewa tenaga buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yang sudah ada dimasyarakat sejak dahulu dan masih digunakan hingga saat ini dengan kompensasi buruh mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. Namun, faktor keadilan yang dirasa “kian menjauh” dari pihak para buruh dan cenderung hanya berpihak pada para majikan, khususnya pada penentuan sistem upah dan faktor ketidakadilan dalam penentuan mekanisme sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem penetapan upah bagi buruh tani antara laki-laki dan perempuan?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor perbedaan sistem upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis diperkaya dengan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data (*editing*), sistemasi data (*sistemizing*). Analisis datanya menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem perbedaan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di Dusun Trimoharjo diperbolehkan menurut hukum Islam, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat, laki-laki lebih besar tanggungjawabnya untuk mencari nafkah, mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. Apabila *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti ada istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerjanya sama. Maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena Al-qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama Mahasiswa	: Siti Nur Kholifah
NPM	: 1421030142
Program Studi	: Mu'amalah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP.196806241997031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)** disusun oleh **Siti Nur Kholifah**, NPM. **1421030142**, Program Studi **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 27 Februari 2018.

TIM MUNAQASYAH

Ketua	: Drs. Susiadi AS, M.Sos.I	(.....)
Sekretaris	: Muslim, S.H.I., M.H.I	(.....)
Penguji I	: Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H	(.....)
Penguji II	: H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H	(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي حَنِيفَةَ)¹

Artinya: Dari Abu Said ra. bahwa Nabi Saw bersabda, “Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya”. (HR. Abdul Razzaq dalam hadist tersebut terdapat riwayat yang munqathi’. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadist maushul menurut dari jalan Abu Hanifah).

¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’aini, *Subulus Salam “Syarah Bulughul Maram”*, Jilid: 3 (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 160.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Edi Sucipto dan Ibu Tukiye ternanta yang selalu memberikan dukungan semangat, materi, serta do'a. Karena tanpa do'a mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan kasih sayang, jerih payah, serta ridho orang tua yang telah menghantarkanku menjadi orang yang berilmu, berbudi dan bertanggung jawab. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Yang saya sayangi Kakek Sarjan, Nenek Pariye, dan keluarga besarku terimakasih atas semua do'anya dan nasehat serta motivasi untukku sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untukku dan semuanya. Amin...
3. Almaterku ternanta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu mendidik, mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Siti Nur Kholifah. Di lahirkan pada tanggal 01 Juni 1996 di Sukabumi, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Merupakan anak tunggal dari buah perkawinan pasangan Bapak Edi Sucipto dan Ibu Tukiye.

Penulis mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) N 3 Bumiharjo dan selesai pada tahun 2008. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 1 Buay Bahuga selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 2 Buay Bahuga selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, yaitu pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah pada Fakultas Syariah dan Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayahnya serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
3. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan dan Dosen Pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Mu’amalah yang membimbing dan memotivasi selama proses akademik berlangsung sehingga bisa menyelesaikan program studi Mu’amalah dengan baik.

4. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing II skripsi yang meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini sampai selesai.
5. Semua Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
7. Sukatmin selaku Kepala Kampung Bumiharjo yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan riset dan penelitian di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.
8. Sahabat-sahabat ku tercinta, Widi Arinda Puspa, Fitri Khoiriyah, Deka Amelia Sari, Hanna Mukaromah, Ayu Aprilia, Nanik Putpita Sari terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini.
9. Teman-teman ku di Asrama Lima, Ervina Damayanti, Diah Utami, Wahyuni Septia Kartika, Ayu Lestari, Sefriani Amelia Sari, Alin Wahyu Rizkiyah, Yuyun Pujiati dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah berbagi keceriaan selama ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Mu'amalah Angkatan 2014, yang terkhusus kelas F yang telah ikut serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman KKN Kelompok 273 Tahun 2017 di Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Prengsewu, terimakasih telah mengajarkan banyak pengalaman baru.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kebatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, dengan iringan rasa terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal Bapak-bapak dan Ibu-Ibu serta teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, Februari 2018
Penulis

Siti Nur Kholifah
1421030142

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam	13
1. Pengertian Akad	13
2. Syarat dan Rukun Akad	14
3. Macam-Macam Akad.....	19
4. Berakhirnya Akad	24
5. Implikasi Akad dan Prosedur Pembatalan Perjanjian	28

B. Upah Menurut Hukum Islam	29
1. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	29
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	31
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>)	39
4. Waktu Pembayaran Upah (<i>Ijarah</i>)	49
5. Berakhirnya Akad Upah (<i>Ijarah</i>)	50
6. Gambaran Umum Tentang Keadilan Gender dalam Islam	51
 BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah	55
1. Sejarah Desa	55
2. Keadaan Geografis	57
3. Keadaan Demografis	60
4. Struktur Desa	61
B. Pola Pekerjaan Buruh Tani	62
C. Sistem Pengupahan Buruh Tani	63
 BAB IV ANALISIS DATA	
A. Sistem Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan	67
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Buruh Tani Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan	69
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Mata Pencarian Penduduk Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan	57
Tabel 1.2	Pendidikan Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan	58
Tabel 1.3	Potensi Lahan Basah Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan	59
Tabel 1.4	Potensi Lahan Kering Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan	61
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kerangka Pertanyaan
2. Surat Keterangan Wawancara
3. Surat Izin Riset
4. Blanko Konsultasi Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud proposal ini, maka perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN UPAH ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN”** (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan). Adapun uraian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan

Yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki dan mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Yaitu seperangkat peraturan-peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

3. Perbedaan

Yaitu selisih atau perselisihan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Kedua, edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470

² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Logos, Wacana Ilmu, 1997) h. 5.

4. Upah

Yaitu sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

5. Laki-Laki

Yaitu orang (manusia) yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis.³

6. Perempuan

Yaitu orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.⁴

Maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, penelitian ini dilakukan pada buruh tani Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis dalam memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah antara Laki-Laki dan Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan merupakan suatu sistem upah yang umum di kalangan masyarakat di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h. 773.

⁴ *Ibid.*, h. 1054.

Way Kanan yang mayoritas muslim. Praktik ini perlu dikaji dalam tinjauan hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain itu judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan mu'amalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Berdasarkan data jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk muamalah yaitu kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut dengan majikan untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah.⁵ Upah merupakan hak bagi setiap orang yang bekerja dalam pemenuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan kewajiban bagi pihak majikan ataupun pihak yang mengerjakan untuk memenuhinya. Apabila diperhatikan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, bahwa para pemberi pekerjaan/pengusaha/majikan sudah jarang sekali memperhatikan kebutuhan

⁵ Siti Nurhanik, "Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), h. 2.

para pekerjanya, dan lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri diatas kesengsaraan orang lain (pekerjanya).⁶ Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai buruh dalam rangka pemenuhan kebutuhan duniawi yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah Swt.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁷ (Q.S. At-taubah: 105).

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁸ Perjanjian kerja dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijarah*), yaitu "*ijarah a'yan*", yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan "*ajir*", sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajir* (pemberi kerja) disebut dengan "*musta'jir*".⁹ Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan antara majikan dan buruh. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan dari ketentuan-

⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 158.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 203.

⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 187.

⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, h. 154.

ketentuan tersebut sehingga muncul permasalahan terhadap upah yang diterima para buruh.

Masyarakat Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way kanan mayoritas bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem pengupahan buruh tani di Kampung Trimoharjo adalah dengan cara buruh melaksanakan pekerjaan dalam hitungan waktu setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dan satu hari (dari jam 07.00-11.00 WIB istirahat dan mulai lagi dari jam 13.00 WIB-17.00 WIB). Jenis pekerjaannya adalah da'ot (mencabut bibit padi yang akan ditanam) dan danger (membersihkan rumput pada tanaman sayuran maupun buah-buahan) adapun upahnya antara lain:

1. Bagi buruh perempuan Rp. 25.000,- dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dengan jatah makan sekali di waktu siang. Apabila tidak diberi makan maka upahnya Rp. 30.000,-. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 50.000,- dengan jatah makan sekali di waktu siang dan Rp. 60.000,- tanpa diberi makan.
2. Bagi buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 30.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 35.000,- tidak diberi makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,- diberi makan sekali di waktu siang dan Rp. 70.000,- tidak diberi makan.¹⁰

¹⁰ Sucipto, Warga Kampung Trimoharjo, Wawancara, tanggal 10 April 2017.

Dusun Trimoharjo mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah ke bawah, sehingga seorang istri harus membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga remaja perempuan yang tidak mengenyam pendidikan lagi yang menyebabkan melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Upah yang didapatkan para buruh tani perempuan relatif rendah daripada buruh tani laki-laki dan tidak sesuai dengan jerih payah mereka dalam bekerja. Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu ketidakadilan bagi buruh perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh laki-laki. Terkadang berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu, seperti: buruh tani perempuan dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat daripada buruh tani laki-laki. Dalam hal ini, perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan membuat buruh tani perempuan mau tidak mau harus menerima upah yang diberikan majikan yang upahnya lebih rendah dari buruh tani laki-laki dan kurangnya kesejahteraan bagi buruh tani perempuan. Padahal upah yang didapatkan itu kurang membantu kebutuhan ekonomi bagi masyarakat Trimoharjo.

Untuk pembayaran upah buruh tani ada yang langsung dibayar setelah setiap selesai kerja dan ada pula yang ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai. Seharusnya upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh laki-laki maupun buruh perempuan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu/pekerja/buruh.

Salah satu pentingnya penelitian ini adalah karena letak geografis dari Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan ini berada di dataran rendah, sehingga penduduknya banyak berprofesi sebagai buruh tani dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun, penduduknya masih minim pengetahuan dalam bermua'malah, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah buruh tani.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan permasalahan yaitu dalam sistem perbedaan upah terdapat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek peneliti dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN UPAH ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN” (Studi buruh tani Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem penetapan upah bagi buruh tani antara laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbedaan sistem upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehubungan dengan masalah pelaksanaan sistem upah.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat tentang upah dan praktiknya yang dilakukan oleh buruh tani di Dusun Trimoharjo.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.¹¹ Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

kebenaran.¹² Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan pada para buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu para buruh tani dan majikan di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), h. 28.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan para buruh tani.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yaitu keseluruhan objek penelitian. Adapun dalam populasi penelitian ini adalah masyarakat Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yaitu majikan 20 orang dan buruh 100 orang.

b. Sampel

Yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁴ Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *proposive sampling* untuk mencari sampel pada buruh, dan diambil 30 orang buruh tani laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk sampel majikan menggunakan teknik penelitian dari Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Karena populasi untuk majikan dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi di jadikan sampel yaitu 20 orang. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 131.

orang dengan perincian sebagai berikut: buruh tani laki-laki 15 orang, buruh tani perempuan 15 orang dan majikan 20 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi).

b. Dokumentasi

Sebuah teknik penelitian di dalam mendapatkan informasi atau data mengenai objek yang diteliti dengan mendokumentasikan objek penelitian tersebut. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data buruh tani Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

5. Metode Pengolahan Data

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah /variabel penelitian.

b. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variabel penelitian.

6. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, dalam hal ini dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti dan menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁵

¹⁵ Lexy L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara etimologi (bahasa), kata akad berasal dari kata *al-‘aqd* (العقد) yang mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali), menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹ Akad yaitu ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan.² Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.³

Secara terminologi (istilah), menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴ Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus, akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, akad adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti *waqaf*, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.

¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 52.

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 45.

³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35.

⁴ Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pengertian akad dalam makna khusus, akad yaitu ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang disyari'atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya. Memberikan pengaruh pada definisi diatas maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi pemilik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.⁵

Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.

2. Syarat dan Rukun Akad

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*) dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶

⁵ Rozalinda, *Op.Cit.*,h. 46.

⁶ Mardani, *Op.Cit.*,h. 53.

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyariatkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada *al-'uqud al-'ainiyyah*.

b. Syarat Sahnya Akad

Menurut ulama Hanafiah, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:

- 1) *Al-Jahalah* yaitu ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab;
- 2) *Al-Ikrah* (keterpaksaan);
- 3) *Attauqit* (pembatasan waktu);
- 4) *Al-Gharar* (ada unsure kemudharatan);
- 5) *Al-Syarthu al-fasid* yaitu syarat-syarat rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah.

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu adanya kepemilikan terhadap

barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan dan pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁷

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4 (empat), yaitu:

a. Para Pihak yang Membuat Akad (*al-'aqidan*)

Aqid (orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. *Ahliyah* adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban *syara'* berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan *mumayiz*. *Wilayah* merupakan kekuasaan atau kewenangan secara *syar'i* yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.⁸

b. Pernyataan Kehendak Para Pihak (*shigatul-'aqd*)

Shigat akad merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang

⁷ Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁸ Rozalinda, *Op.Cit.*,h. 47-48.

melakukan akad. *Shigat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Sementara *qabul* adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama.⁹

c. Objek Akad (*ma'qud 'alaih*)

Yang dimaksud dengan objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.¹⁰ *Amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, atau diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun benda tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.¹¹ Objek akad harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur najis). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairu mutaqawwim*).¹²
- 2) Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha mengecualikan ketentuan ini untuk ada

⁹ *Ibid.*, h. 51.

¹⁰ Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹ Pasal 1 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 50.

salam, ijarah, hibah, dan istishna', meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.

- 3) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang yang diakadkan.
- 4) Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad, maka akadnya batal.
- 5) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun bukan materi. Maksudnya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.

d. Tujuan Akad (*maudhu' al-'aqd*)

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.¹³ Menurut ulama fiqh, tujuan suatu akad harus sesuai dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syara'*.

¹³ Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Macam-Macam Akad

a. Berdasarkan sifat akad secara syariat, terbagi menjadi 2 yaitu:

1) *Aqad shahih*

Yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya menurut syariat yang berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad.¹⁴ Pengertian lain *aqad shahih* adalah setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. *Aqad shahih* menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada:

a) *Nafiz* yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. *Aqad nafiz* terbagi kepada:

(1) *Aqad lazim* yaitu tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad yang mengikat para pihak yang berakad, seperti akad jual-beli dan *ijarah* (sewa-menyewa dan upah-mengupah). *Ghairu lazim* yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad saja tanpa harus ada kerelaan pihak lain. Akad ini merupakan akad yang tidak mengikat para pihak sehingga dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah

¹⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 10.

seorang yang berakad tanpa harus meminta kerelaan pihak lain.

Misalnya akad *wakalah*, *ariyah*, dan *wadi'ah*.

- (2) *Aqad mauquf* yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayiz*. Akad ini bisa berakibat hukum apabila ada keizinan walinya, jika tidak ada izin wali maka akad itu batal, ini merupakan pendapat Hanafiyah. Namun, akad ini batal menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah.

2) *Aqad ghairu shahih*

Yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Dengan demikian akad ini berdampak hukum tidak sah. Menurut Jumhur ulama terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak member pengaruh apa pun dan tidak mengikat terhadap para pihak. Sementara itu, ulama Hanfiyah membagi *aqad ghairu shahih* menjadi 2, yaitu:

- a) *Aqad batil* adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah seorang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan *mal ghairu mutaqawwim* seperti *khamar*. Terhadap *aqad batil*, apa pun yang diakadkan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap objek akad dan para pihak yang melakukan

akad, karena akadnya dipandang tidak ada. Inilah yang dikatakan dalam hukum positif dengan batal demi hukum.

- b) *Aqad fasid* yaitu akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual-beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud. Terhadap *aqad fasid* wajib difasakhkan, baik oleh salah seorang dari dua orang yang berakad, maupun oleh hakim karena akad tersebut terlarang secara *syar'i*.

b. Berdasarkan bernama atau tidaknya suatu akad terbagi:

1) *Aqad Musammah*

Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh *syara'* dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti: *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan sebagainya.

2) *Akad Ghairu Musammah*

Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh *syara'* dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti :*aqad istishna'* *bai' al-wafa'*.¹⁵

c. Berdasarkan motifnya

Berdasarkan motifnya, maka akad diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

¹⁵ Rozalinda, *Op.Cit.*,h. 59.

1) Akad *Tijarah* (*muawwadah* atau *compensational contract*)

Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad ini adalah investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

2) Akad *Tabarru'* (*gratuitons contract*)

Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Contoh akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hiwalah*, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain.¹⁶

d. Berdasarkan sifat benda, akad terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Akad *'ainiyah*

Yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah*, *ariyah*, *wadi'ah*, *rahn*, dan *qiradh*.

2) Akad *ghairu 'ainiyah*

Yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya *shigat* akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh

¹⁶ Mardani, *Op.Cit.*, h. 60-61.

serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad *ainiyah*, seperti akad amanah.¹⁷

e. Menurut berhubungannya pengaruh akad, dibagi menjadi 3 yaitu:

1) *Aqad munajaz*

Yaitu akad yang bersumber dari *shigat* yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti perkataan: “Saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian” yang langsung diterima oleh pihak lain.¹⁸

2) Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang

Yaitu akad yang bersumber pada *shigat* yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum bila batasan waktu tiba, seperti: “Saya akan menyewakan rumah ini kepada kamu selama setahun pada awal bulan”.

3) Akad yang dihubungkan dengan syarat

Yaitu akad yang dihubungkan dengan urusan lain dengan satu syarat, misalnya: “Jika kamu bepergian nanti kamu menjadi wakilku”.

f. Berdasarkan unsur tempo dalam akad, maka akad dibagi menjadi 2, yaitu:

1) *Aqad al-zamani* (akad bertempo) adalah akad yang didalamnya unsure waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar, dan lain-lain. Dalam akad sewa-

¹⁷ *Ibid.*, h. 62.

¹⁸ Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 60.

menyewa, misalnya termasuk dalam isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai akad. Tidaklah mungkin suatu akad sewa-menyewa terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam masa persewaan berlangsung.

- 2) *Aqad al-fairu* (akad tidak bertempo) adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual-beli misalnya, dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akd tersebut. Bahkan apabila jual-beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.

4. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal berikut:

a. Berakhirnya Masa Berlaku Akad

Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak. Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada Q.S. At-Taubah (9): 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya: Kecuali orang-orang musyriki yang telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.¹⁹(Q.S. At-Taubah (9):4)

- b. Pihak yang berakad membatalkan Akad atau Terjadinya Pembatalan atau Pemutusan Akad (*fasakh*)

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).²⁰ Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan alqur'an di antaranya Q.S. At-Taubah (9): 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.²¹ (Q.S. At-Taubah (9): 7)

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 187.

²⁰ Mardani, *Op.Cit.*,h. 71.

²¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 188.

Selain itu, pembatalan/pemutusan akad dapat terjadi dengan sebab-sebab berikut:²²

- 1) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-'aqd*). Misalnya, jual-beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahalah*) dan tertentu waktunya (*mu'qqat*).
- 2) Adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyah*, *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*, atau *khiyar majelis*.
- 3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.

Q.S. At-Taubah (9) ayat 12-13:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا
 أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا
 تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ
 بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

²² Mardani, *Op.Cit.*,h. 72.

Artinya:12) Dan jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. 13) Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.²³ (Q.S. At-Taubah (9): 12-13)

c. Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika orang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli waris.

d. Jika Ada Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (Penipuan)

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT Q.S. Al-Anfal (8): 58:

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

²³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 188.

Artinya: *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*²⁴ (Q.S. Al-Anfal (8): 58)

5. Implikasi Akad dan Prosedur Pembatalan Perjanjian

Akad yang terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum), baik pengaruh khusus maupun pengaruh umum. Pengaruh khusus merupakan pengaruh asal akad atau tujuan mendasar dari akad, seperti pemindahan pemilikan pada akad jual-beli dan *hibah*, pemindahan pemilikan manfaat pada akad *ijarah*, *ariyah*, menghalalkan hubungan suami-istri pada akad nikah, dan sebagainya. Pengaruh umum merupakan pengaruh yang berserikat pada setiap akad atau keseluruhan dari hukum-hukum dan hasilnya. Terhadap semua akak ada 2 pengaruh umum, yaitu *nafaz* dan *iltizam*, yaitu keadaan seseorang dibebani suatu perbuatan atau terhalang melakukan suatu perbuatan, misalnya menyerahkan barang atau menerima uang. Sumber dari *iltizam* adalah *syara'*.²⁵ Untuk terlaksananya *iltizam*, dibutuhkan *nafaz*.

Nafaz merupakan pengaruh tertentu terhadap akad yang menghasilkan *natijah* ketika terjadinya akad. Maksudnya, keharusan seorang *mukallaf* untuk berbuat atau tidak berbuat, misalnya menyerahkan harta atau tidak berbuat aniaya pada harta orang lain. Sementara itu, *nafaz* akad jual-beli adalah pemindahan kepemilikan barang. *Luzum* merupakan tidak dapatnya membatalkan akad kecuali dengan kerelaan. Artinya, pihak-pihak yang berakad tidak berhak membatalkan akad yang telah dilakukan kecuali dengan kerelaan pihak lain.

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 184.

²⁵ Rozalinda, *Op.Cit.*,h. 53.

Sama halnya dengan tidak akan terjadi akad tanpa kerelaan kedua pihak, demikian juga untuk membatalkan akad harus berdasarkan kedua pihak pula. Prosedur pembatalan perjanjian yaitu terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, disertai alasannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad, bertujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

B.Upah Menurut Hukum Islam

1.Pengertian Upah (*Ijarah*)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”.²⁶ *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Twadhu* (ganti).²⁷ *Ijarah* adalah (menjual manfaat).²⁸ *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.²⁹ *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda maupun imbalan suatu kegiatan. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).³⁰

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 7.

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

²⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 145.

³⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 874.

Secara terminologi, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Qahiri pengarang *Mughni Al-Muhtaj* yang bermazhab Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui.³¹ Sementara itu, Al-Qaduri yang bermazhab Hanafiah mendefinisikannya sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberikan imbalan.³² Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, dan kebolehan dengan pengganti tertentu.³³ Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.³⁴

Mengenai sifat akad *al-ijarah* para ulama berbeda pendapat, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.³⁵ Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang-undangan

³¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Loc. Cit.*

³² *Ibid.*

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 236.

yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.³⁶ Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.³⁷

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³⁸ Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Jadi, upah adalah suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

- a. Q. S Al-Baqarah (2): 233 disebutkan:

... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

³⁶ Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

³⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 145.

³⁸ A. Khumedi Ja'far, *Loc.Cit.*

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْعُرْوَفِ^{٣٩} وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ^{٤٠}

Artinya: ... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁹ (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mebayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁴⁰

b. Q.S Az-Zukhruf (43): 32 disebutkan:

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^{٣٢} نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^{٣٣}
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا^{٣٤} وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ^{٣٥}

³⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 37.

⁴⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, Cet. Ke-1, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 350.

Artinya:Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁴¹(Q.S. Az-Zukhruf: 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam soal kehidupan didunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihi sebagian orang-orang atas sebaaian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorang pun dapat menundukkan yang lain.⁴²

c. Q. S An-Nahl (16): 97 disebutkan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁴³(Q.S. An-Nahl(16):97)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang melakukan amal shaleh dan melaksanakan segala kewajibannya dan rezeki yang diperoleh diatur oleh Allah SWT, sebaliknya bagi orang-orang yang durhaka

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 491.

⁴² Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, Cet. Ke-1, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 148.

⁴³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 278.

maka diancam dengan siksaan-Nya, termasuk orang-orang yang merampas hak orang lain akan menerima balasan-Nya.⁴⁴

d. Q.S Ath-Thalaaq (65):6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعُ لَهُنَّ آخَرَىٰ ۚ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁵ (Q.S Ath-Thalaaq (65):6)

e. As-Sunnah

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِيهِ (رواه البخاري)⁴⁶

Artinya: Ibnu Abbas ra. berkata, “Rasulullah Saw. berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tidaklah beliau memberi upah”. (HR. Bukhari)

⁴⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XIV, Cet. Ke-1, (Semarang: Toha Putra, 1987), h. 249.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 559.

⁴⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam “Syarah Bulughul Maram”*, Jilid: 3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 153.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عِرْقُهُ
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ⁴⁷

Artinya: Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ) ⁴⁸

Artinya: Dari Abu Said ra. bahwa Nabi Saw bersabda, “Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya”. (HR. Abdul Razzaq dalam hadist tersebut terdapat riwayat yang munqathi’. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadist maushul menurut dari jalan Abu Hanifah).

Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

f. Ijma’

Ijarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan.⁴⁹ Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang

⁴⁷ Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 490.

⁴⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Op.Cit.*, h. 160.

⁴⁹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 387.

diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁵⁰

g. Dasar Hukum Undang Undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30 tentang ketenagakerjaan, “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁵¹ Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) “menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 1602 KUHPerdara “majikan diwajibkan membayar kepada buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan”.⁵² Demikian halnya dengan hak-hak lain yang sepenuhnya diserahkan kepada majikan, karena masalah perburuhan ini merupakan masalah keperdataan. Jika hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan majikan), maka tujuan hukum perburuhan untuk mencapai keadilan sosial dibidang perburuhan akan sangat sulit

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 11.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵² R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 400.

tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah.⁵³

Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya. Kerangka kerja standar *International Labour Organization* (ILO) di bidang ini didasarkan pada dua perhatian utama:⁵⁴

- 1) Menjamin kesetaraan kesempatan dan perlakuan didalam mengakses pelatihan, pekerjaan, promosi jabatan, keorganisasian dan pengambilan keputusan, demikian juga kesepastian kondisi yang setara dalam upah, tunjangan, jaminan sosial dan pelayanan kesejahteraan.
- 2) Melindungi pekerja perempuan khususnya terkait dengan syarat-syarat dan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan kehamilan.

Konvensi *International Labour Organization* (ILO) yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan promosi kesetaraan adalah:⁵⁵

⁵³ Lalu Husni, *Op.Cit.*,h. 23.

⁵⁴ Konvensi-Konvensi ILO tentang Kesetaraan Gender di Dunia Kerja.

⁵⁵ *Ibid.*

1) Konvensi Upah yang Setara, 1951 (No.100):

- a) Upah yang setara untuk jenis pekerjaan yang memiliki nilai yang setara berarti suatu standar upah yang baku tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
- b) Memberikan upah sebagai imbalan dan honorarium baik dalam bentuk tunai maupun natura.
- c) Melakukan penilaian terhadap pekerjaan secara obyektif berdasarkan isi dari pekerjaan tersebut.

2) Rekomendasi Upah yang Setara, 1951 (No.90)

- a) Merekomendasi pemerintah untuk memastikan bahwa pengusaha dan pekerja memperoleh informasi tentang persyaratan hukumnya.
- b) Prinsip upah yang setara dapat diterapkan dengan memadai melalui:
 - (1) Penetapan metode analisis terhadap pekerjaan yang dilakukan secara memadai.
 - (2) Pemberian fasilitas panduan magang, pelatihan dan penempatan untuk meningkatkan efisiensi perempuan yang setara bagi ke dua jenis kelamin.
 - (3) Pemberian pelayanan sosial dan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan.
 - (4) Promosi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam mengakses pekerjaan.

(5) Promosi pemahaman publik tentang prinsip-prinsip kesetaraan, dan penelitian serta studi-studi lapangan.

3) Konvensi Mengenai Kesetaraan Upah, 1951 (Pasal 3)

- a) Apabila tindakan ini dapat membantu pelaksanaan ketentuan Konvensi ini, maka langkah-langkah akan diambil untuk mempromosikan penilaian kerja yang obyektif berdasarkan pekerjaan yang akan dilakukan.
- b) Cara-cara yang akan ditempuh dalam penilaian ini dapat diputuskan oleh petugas yang bertanggung jawab untuk menentukan nilai upah atau bila nilai upah tersebut ditetapkan melalui kesepakatan kerja bersama, oleh pihak-pihak terkait.
- c) Nilai upah yang berbeda antar pekerja, tanpa memandang jenis kelamin mereka, yang sesuai dengan perbedaan, seperti yang ditetapkan melalui penilaian yang obyektif, pekerjaan yang akan dilaksanakan, tidak akan dianggap bertentangan dengan asas pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan atas pekerjaan yang sama nilainya.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat *ijarah* ada empat (4), yaitu:

a. '*Aqid* (orang yang berakad)

Mu'ajir dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan

menyewakan (majikan), sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja).⁵⁶ Persyaratan orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu kedua-duanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika salah seorang berakad itu gila atau anak kecil menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka akad menjadi tidak sah.

Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu balig.⁵⁷ Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka itu dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.⁵⁸ Syarat yang terakhir adalah kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Jika salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *Ijarah*, maka tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa (4):29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁵⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet. Ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 232

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁹(Q.S An-Nisa (4): 29)

b. *Shighat*

Yaitu *ijab* dan *qabul* antara *Mu'ajir* dan *Musta'jir*, *ijab qabul* sewa menyewa dan upah-mengupah. Syarat *shighat* yaitu harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan, tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain, harus terjadi atas kesepakatan bersama.⁶⁰ *Shighat* transaksi mencakup hal-hal berikut:⁶¹

- 1) *Ijab* dan *Qabul* harus sesuai. Jika seseorang berkata, “Saya sewakan rumah ini kepadamu seratus ribu sebulan”, kemudian dibalas “Saya terima dengan bayaran Sembilan puluh ribu”, transaksi tidak sah karena terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul*. Perbedaan ini menunjukkan ketidakrelaan salah satu pihak, padahal kerelaan ini menjadi syarat sahnya transaksi.
- 2) Antara kalimat *ijab* dan kalimat *qabul* tidak berselang waktu yang lama atau diselingi dengan ucapan lain yang tidak ada kaitannya dengan transaksi karena hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap akad.
- 3) Tidak boleh menggantungkan transaksi pada suatu syarat, misalnya: “jika Zaid datang, akan aku sewakan ini kepadamu”.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 83.

⁶⁰ A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 189.

⁶¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Op.Cit.*, h. 150.

Contoh *Ijab qabul* sewa-menyewa, misalnya: “Aku sewakan motor ini kepadamu setiap hari Rp. 20.000,00”, maka *musta’jir* menjawab “Aku terima sewa motor tersebut dengan harga demikian setiap hari”.

Adapun *ijab qabul* upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 10.000,00”, kemudian *musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

c. *Ujrah* (upah)

Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas. Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu.

Hal itu karena sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.⁶² Syarat yang lainnya yaitu harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 401.

dipastikan kehalalannya, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. Manfaat

Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal berikut:⁶³

- 1) Dapat ditaksir, maksudnya: manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, harta penggantinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal, syariat melarang untuk menyia-nyiakan harta.
- 2) Orang yang menyewakan (*mu'ajir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa (*musta'jir*) dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan (*mu'ajir*) tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun *syar'i*, transaksi tidak sah.
- 3) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'ajir*). Oleh sebab itu, tidak sah menyewa orang untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat yang tidak bisa digantikan, seperti shalat dan puasa, karena manfaat pekerjaan itu merupakan pahala bagi orang yang menyewakan, bukan untuk penyewa (*musta'jir*). Setiap para pihak yang melakukan akad harus

⁶³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Op.Cit.*, h. 151-152.

mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya, menjelaskan masa sewa; seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan. Terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja.⁶⁴

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *'aqid*.⁶⁵

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga (3) perkara yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad
2. Mempercepat tanpa adanya syarat
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan. Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*

⁶⁵ Rachmat syafei, *Op.Cit.*, h. 132.

seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:⁶⁶

a. *Ijarah khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah musytarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Upah atau *ujrah* dapat dikalsifikasikan menjadi 2 yaitu:⁶⁷

a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

Yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

b. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*)

Yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Sebelum melakukan transaksi, perlu adanya perjanjian diantara para pihak agar transaksi dapat dilakukan dengan jelas. Adapun asas perjanjian dalam hukum Islam yaitu:⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*, h. 133-134.

⁶⁷ M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 194

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 83-92.

1. Asas Ibadah (*Mabda' al-ibahah*)

Asas ini merupakan “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶⁹ (Q.S. al-Maidah (5):1)

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h.106.

4. Asas Janji itu Mengikat

Allah SWT menganjurkan kepada manusia, dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.*⁷⁰ (Q.S Al- Israa' (17): 34).

4. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.⁷¹

5. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (*masyaqqah*) atau menimbulkan kerugian (*mudharat*) diantara para pihak yang melakukan perjanjian.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h.285.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Cakrawa Ia Publishing, 2009), h. 33.

6. Asas Amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.⁷² Selain itu, apabila tidak adanya kejujuran maka akan menimbulkan kecurigaan diantara para pihak.

7. Asas Keadilan

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa.⁷³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepadataqwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁷⁴ (Q.S Al-Maaidah (5): 8)

⁷² Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 37.

⁷³ *Ibid.*, h. 33.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 108

4. Waktu Pembayaran Upah (*Ijarah*)

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi.⁷⁵ Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁷⁶ Pasal 1602 ayat (a) KUHPerdara “upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja”.⁷⁷

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

⁷⁵ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 41.

⁷⁶ A. Khumedi Ja'far, *Loc.Cit.*

⁷⁷ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Loc.Cit.*

Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad Saw.pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).⁷⁸ Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. Upah yang diberikan oleh pengusaha tidak boleh diskriminasi antara pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Undang-Undang No. 80 Tahun 1957) yang merupakan ratifikasi konvensi ILO No. 100 Tahun 1951.

5. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:⁷⁹

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang;
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan selesainya pekerjaan;

⁷⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Loc.Cit.*

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*,h. 237.

- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem*fasakh*kan sewaan itu;
- f. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual-beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

6. Gambaran Umum Tentang Keadilan *Gender* dalam Islam

Perbedaan *gender* sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan *gender*. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan *gender* telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan *gender* merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.⁸⁰ Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dan mempunyai kedudukan yang terhormat. Oleh karena itu, Al-qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya. Seperti firman Allah SWT Surat An-Nisa' (4):124.

⁸⁰ Fatimah Zuhrah, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, (Peneliti IAIN-SU), h. 1.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*⁸¹ (QS. An-Nisaa' (4):124)

Sekarang terdapat sekelompok wanita yang meningkatkan skala ekonomi, yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan atau memilih untuk membesarkan anak-anak mereka, yang kemudian wajib melakukan kerja paruh waktu seberapa mereka mampu.⁸² Para wanita ini tidak memiliki keamanan atau status dan karena itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan eksploitasi dari majikan mereka. Wanita harus masuk ke tempat kerja dengan jaminan adanya upah yang setara, status setara dan kesempatan setara, meskipun kenyataan sering kali berbeda. Para wanita yang sekarang berada pada posisi administratif, akademis atau pendidikan menengah atau senior tidak dapat mendapatkan keamanan dari tradisi yang telah ada sebelum mereka.⁸³

Saat akhirnya muncul perundang-undangan setelah perdebatan yang berkepanjangan dan usaha yang tiada henti-hentinya oleh beberapa individu yang mengabdikan waktu dan energi mereka untuk mengubah kondisi-kondisi ini, kemenangan pun diproklamirkan. Meskipun demikian, perundangan yang ditujukan untuk memperkecil praktek-praktek rasialisme atau perbedaan kelamin akan mengawali perubahan dalam tanggapan individu dalam masyarakat yang sangat emosional.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 98.

⁸² A. Reni Eta, *Wanita di Tempat Kerja*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 140-141.

⁸³ *Ibid.*,

Perubahan dalam suatu sistem sosial, di dalam tingkatan dan hierarki, terjadi sangat perlahan. Perubahan terjadi lebih cepat namun sikap membedakan karena kelamin, asumsi, dan diskriminasi tetap tidak berubah dan tak tersentuh oleh rekomendasi hukum dan pembuat kebijakan. Merupakan hal yang tidak ada artinya untuk menyatakan bahwa pengalaman kerja adalah sama pada wanita maupun pria.

Masuknya kaum perempuan sebagai buruh dengan upah lebih rendah dari laki-laki, menciptakan apa yang disebut tenaga buruh cadangan. Akibatnya, jumlah tenaga buruh yang membutuhkan pekerjaan semakin banyak dan sangat menguntungkan bagi industri (karena seakan-akan buruh yang membutuhkan industri, bukan industri yang membutuhkan buruh). Berbagai upaya dan aturan sepihak terpaksa harus dituruti oleh buruh semata-mata karena takut tenaganya tidak digunakan oleh industri.⁸⁴

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh laki-laki, seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar.⁸⁵

⁸⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Ke-15, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 104.

⁸⁵ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 23.

Dengan demikian dalam perspektif Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT, dan diberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.⁸⁶

⁸⁶ Fatimah Zuhrah, *Op., Cit.* h. 21.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah

1. Sejarah Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo

Kampung Bumiharjo dibentuk pada tanggal 29 Muharam 1380 Hijriyah atau Tanggal 4 Bulan Juni Tahun 1960 Masehi. Pendiri Kampung Bumiharjo adalah Bapak Sukirman pada waktu itu beliau adalah Kepala Desa Sumberharjo Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan. Serta para tokoh-tokoh masyarakat Desa Bumiharjo yaitu Bapak Niswari dan Bapak Arjo. Bapak Niswari adalah sebagai kepala tebang (perintis) pembukaan Desa waktu itu. Dasar pembuatan nama Desa Bumiharjo adalah diambil dari Desa Sumberharjo dan Desa Sukabumi karena Desa Bumiharjo adalah Desa yang berada di kedua Desa tersebut yaitu Desa Sukabumi diambil nama Bumi dan Desa Sumberharjo diambil nama Harjo jadi lengkaplah dari nama Bumi dan Harjo (Bumiharjo) Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan : Propinsi Sumatera Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan : Desa Karang
- c. Sebelah Barat berbatas dengan : Desa Sukabumi dan Sukadana
- d. Sebelah Timur berbatas dengan : Desa Bumiagung Wates

Urutan-urutan wilayah Dusun:

- a. Pada tahun pembukaan Desa Bumiharjo terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Bumiharjo dan Dusun Trimoharjo dengan jumlah KK ada 214 KK dengan jumlah penduduknya 748 jiwa.
- b. Pada Tahun 1963 berdiri Dusun Tanjungrejo yang terdiri dari 17 KK = 54 jiwa. Jadi Desa Bumiharjo 231 KK = 802 jiwa.
- c. Pada Tahun 1964 Dusun Bumiharjo I dimekarkan menjadi 2 Dusun jadi Dusun yang ada ialah : Dusun Bumiharjo I, Dusun Bumiharjo II , Dusun Trimoharjo dan Tanjungrejo (4 Dusun).
- d. Pada Tahun 1973 Kecamatan Pakuan Ratu dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Bahuga, termasuk Desa Bumiharjo berada di Kecamatan Bahuga.
- e. Pada Tahun 1983 Desa Bumiharjo dimekarkan/ditambah 3 Dusun yaitu di seberang Sungai Pisang yaitu : Dusun Sidorejo, Dusun Bumiayu, Dusun Balirejo jadi terdiri dari 7 (Tujuh) Dusun dengan jumlah KK = 660 KK dengan jumlah penduduk = 2.456 jiwa.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan : Propinsi Sumatera Selatan
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan : Kampung Bumiayu Kecamatan Bumiagung
- 3) Sebelah Barat berbatas dengan : Kampung Sukabumi dan Kampung Sukadana

- 4) Sebelah Timur berbatas dengan : Kampung Sritunggal dan Kampung Mekarjaya Kecamatan Bahuga

2. Keadaan Geografis

Kampung Bumiharjo adalah Kampung terujung di Propinsi Lampung yang membujur dari Utara ke Selatan dengan luas : $7,5 \text{ km} \times 2 \text{ km} = 15 \text{ km persegi}$ (1.500 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan : Propinsi Sumatera Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan : Kampung Bumiayu Kecamatan Bumiagung
- c. Sebelah Barat berbatas dengan : Kampung Sukabumi dan Kampung Sukadana
- d. Sebelah Timur berbatas dengan : Kampung Sritunggal dan Kampung Mekarjaya Kecamatan Bahuga.

Tabel 1.1
Mata Pencanharian Penduduk Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo
Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan

Mata pencaharian	Jumlah
Buruh Tani	210 Orang
Petani	876 Orang
Pedagang/Wiraswasta/Pengusaha	48 Orang
Pengrajin	34 Orang
PNS	55 Orang
TNI/Polri	9 Orang
Penjahit	4 Orang

Montir	6 Orang
Supir	6 Orang
Karyawan Swasta	78 Orang
Tukang Kayu	13 Orang
Tukang Batu	10 Orang
Guru Swasta	13 Orang

Tabel 1.2
Pendidikan Penduduk Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan
Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan

Pendidikan	Jumlah
Belum Sekolah	608 Orang
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	257 Orang
Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	1318 Orang
Tamat SD/Sederajat	122 Orang
SLTP/Sederajat	470 Orang
SLTA/Sederajat	124 Orang
D-1	12 Orang
D-2	11 Orang
D-3	9 Orang
S-1	14 Orang
S-2	1 Orang

Tabel 1.3
Potensi Lahan Basah Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan
Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan

Luas Kampung Bumiharjo adalah 1.500 Ha dengan penggunaan sebagai berikut:

Lahan Basah	Luas
Sawah irigasi teknis	327,- Ha.
Sawah setengah irigasi teknis	69,- Ha.
Sawah tadah hujan	54,- Ha.
Rawa-rawa	2,- Ha.
Sungai alam dan buatan	5,5- Ha.
Kolam/empang	2,- Ha.
Jumlah seluruhnya lahan basah	459,5 Ha.

Tabel 1.4
Potensi Lahan Kering Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan
Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan

Lahan Kering	Luas
Tanah pemukiman/pekarangan	475,- Ha.
Tanah peladangan	112,- Ha.
Tanah perkebunan	418,- Ha.
Tanah padang alang-alang/pangonan	- Ha.
Hutan wisata (pramuka)	5,- Ha.
Tanah lapang/ alon-alon	2,2 Ha.
Hutang lindung	- Ha.

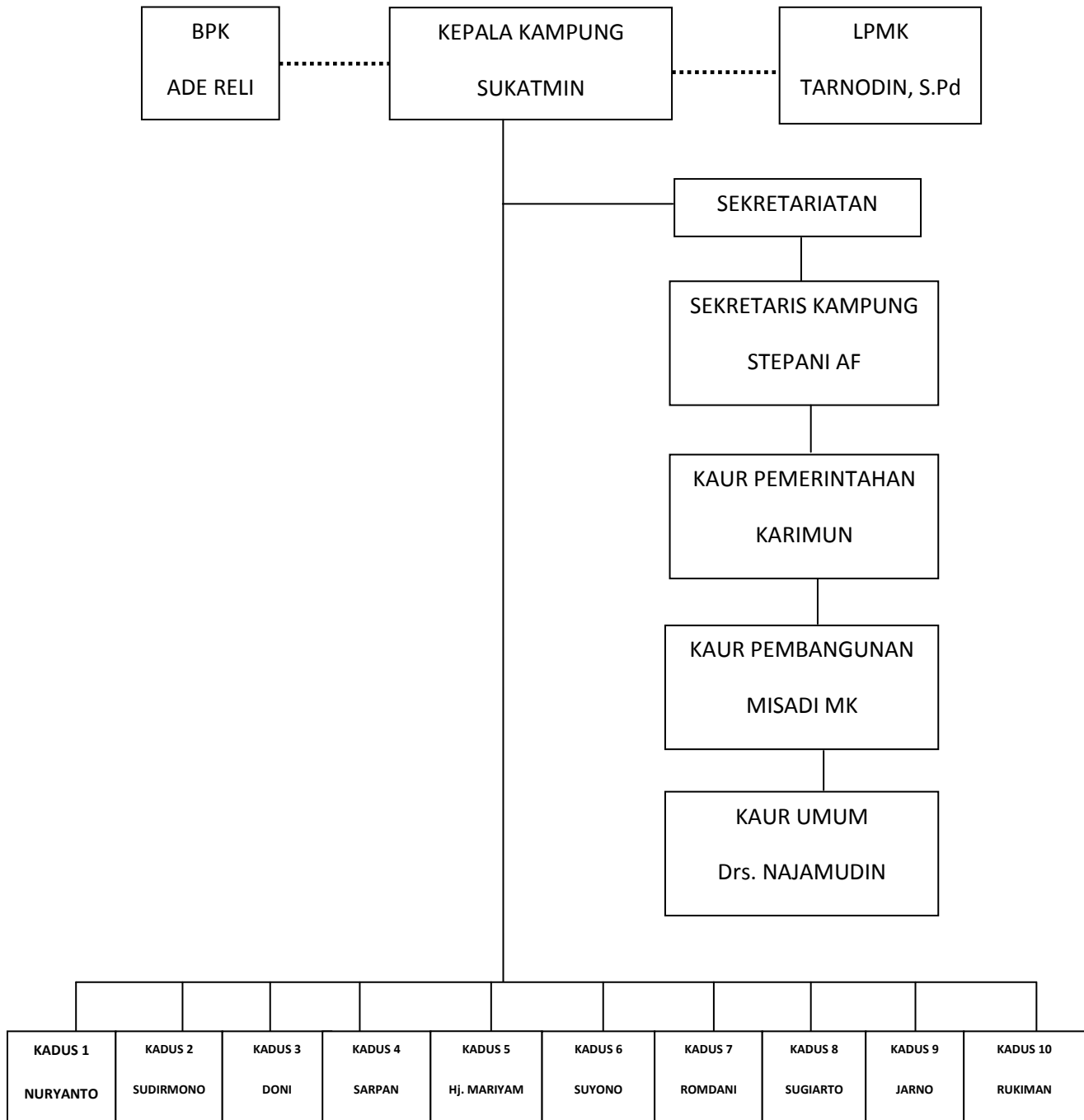
Tanah pemakaman (TPU)	2,5 Ha.
Tanah perkantoran dan sekolah	8,6 Ha.
Tanah tempat ibadah (masjid-mushola-pura)	2,3 Ha.
Tanah pasar kampung	0,5 Ha.
Tanah jalan dan cang jembatan	13,- Ha.
Lain-lain	1,- Ha.
Jumlah seluruhnya lahan kering	1.040,5 Ha.

3. Keadaan Demografis

- a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak : 1.183 KK
 - Jumlah KK yang berstatus Kawin : 1.009 KK
 - Jumlah KK yang berstatus Duda/Janda : 174 KK
- b. Jumlah Jiwa terdiri dari :
 - Penduduk Laki-Laki sebanyak : 2.190 Jiwa
 - Penduduk Perempuan sebanyak : 1.907 Jiwa
 - Jumlah jiwa seluruhnya sebanyak : 4.097 Jiwa

4. Struktur Desa

Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga



B. Pola Pekerjaan Buruh Tani

Masyarakat Dusun Trimoharjo merupakan masyarakat yang bermata pencarian utama dibidang pertanian, baik persawahan, ladang dan lain sebagainya. Saat seorang majikan yang memiliki sawah/ladang yang harus dikelola seperti, majikan membuat persemaian benih padi yang nantinya akan ditanam disawah, ketika benih padi tersebut sudah tumbuh dan waktunya untuk dipindahkan kesawah, maka majikan membutuhkan buruh untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mencari buruh yang akan melakukan pekerjaan dipersawahan maupun diladang, maka majikan mengontak buruh tani dengan cara langsung mendatangi rumah buruh tani tersebut, kemudian antara majikan (*mu'ajir*) dan buruh (*musta'jir*) melakukan perjanjian kerja secara lisan bukan tertulis tanpa ada saksi.¹

Majikan memberitahu mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh dan waktu dalam bekerja termasuk akan diberi makan siang atau tidak diberi makan siang, jika tidak diberi makan siang biasanya majikan memberikan minum beserta makanan ringan atau rokok bagi buruh laki-laki.² Walaupun jam kerja sudah ditentukan antara majikan dan buruh, akan tetapi tidak sedikit buruh yang memulai pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti yang seharusnya buruh berangkat jam 07.00 WIB tetapi buruh malah berangkat jam 08.00 WIB.³

¹ Gaseh, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 11 November 2017.

² Suwari, Pemilik Sawah/Majikan, Wawancara, Tanggal 11 November 2017.

³ Ismael, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 11 November 2017.

Perjanjian akad semacam ini sudah menjadi tradisi di masyarakat Dusun Trimoharjo dari majikan kepada pekerja/ buruh. Jam kerja yang terjadi di Dusun Trimoharjo yaitu untuk hitungan setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dan satu hari (dari jam 07.00-11.00 WIB istirahat dan mulai lagi dari jam 13.00-17.00 WIB) mendapat makan sekali di waktu jam istirahat atau tidak mendapat makan sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan buruh. Saat buruh melakukan pekerjaannya, terkadang diawasi oleh majikan untuk melihat proses pekerjaan buruh.⁴ Akan tetapi, majikan sering tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dalam tata cara melakukan pekerjaannya dengan rapi, sehingga buruh terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap majikan.⁵

Ketika majikan tidak sedang mengawasi pekerjaan buruh, terkadang buruh mencuri waktu untuk istirahat disaat waktu kerja sampai ada seorang buruh yang pulang lebih awal sebelum jam istirahat maupun sebelum jam kerja selesai.⁶ Hal ini, yang menyebabkan majikan tidak dapat menaikkan upah buruh termasuk untuk perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan.⁷

C. Sistem Pengupahan Buruh Tani

Sistem pengupahan memiliki peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk usaha yang member manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan

⁴ Suminem, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 11 November 2017.

⁵ Sariyem, Pemilik Sawah/Majikan, Wawancara, Tanggal 11 November 2017.

⁶ Sunimah, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 11 November 2017.

⁷ Sarkin, Pemilik Sawah/Majikan, Wawancara, Tanggal 11 November 2017.

rukun dan syarat yang telah terpenuhi dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi masyarakat Dusun Trimoharjo upah-mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani dan buruh.⁸ Dusun Trimoharjo mayoritas kehidupan masyarakatnya berada di menengah ke bawah, sehingga seorang perempuan/istri banyak yang memilih menjadi buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan pekerjaan yang biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki.⁹

Penetapan upah pada buruh tani sebaiknya mengacu pada konsep kesetaraan gender, dimana upah yang ditentukan harus berdasarkan kualitas kerja seseorang, sehingga tidak terjadi diskriminasi upah ada tenaga kerja. Bentuk upah buruh tani di Dusun Trimoharjo terdapat 2 yaitu uang dan beras, tetapi mayoritas masyarakatnya menggunakan upah uang, yang menetapkan upah untuk buruh tani adalah majikan.¹⁰ Pekerjaan yang jenisnya harian dalam penetapan upah tidak ada tawar menawar antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, tetapi pekerjaan yang jenisnya borongan terdapat tawar menawar antara *mu'ajir* dan *musta'jir*. Pembayaran upah dilaksanakan setelah pekerjaan buruh selesai, yang menjadi landasan pembayaran upah adalah yang umumnya terjadi di masyarakat Dusun Trimoharjo.¹¹ Apabila ada pekerjaan tambahan maka majikan memberikan upah tambahan kepada buruh.¹²

⁸ Murti, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 13 November 2017.

⁹ Warsiem, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 12 November 2017.

¹⁰ Kamdik, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 13 November 2017.

¹¹ Samsul, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 16 November 2017.

¹² Karem, Pemilik Sawah/Majikan, Wawancara, Tanggal 11 November 2017.

Jenis pekerjaan diantaranya yaitu yang dilakukan oleh buruh yaitu *da'ot* (mencabut bibit padi yang akan ditanam) dan *danger* (membersihkan rumput pada tanaman sayur-sayuran maupun buah-buahan). Bagi buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 30.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 35.000,- tanpa dikasih makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,- dikasih makan sekali di waktu siang dan Rp. 70.000,- tanpa dikasih makan. Sedangkan buruh perempuan Rp. 25.000,- dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dengan jatah makan sekali di waktu siang. Apabila tidak dikasih makan maka upahnya Rp. 30.000,-. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 50.000,- dengan jatah makan sekali di waktu siang dan Rp. 60.000,- tanpa dikasih makan.¹³

Upah yang didapat buruh laki-laki dan perempuan berbeda walaupun jenis pekerjaan dan berat pekerjaan sama, hal ini membuat sebagian masyarakat terutama buruh perempuan mengalami ketidakadilan dalam upah kerja.¹⁴ Biasanya buruh perempuan dalam melakukan pekerjaan lebih cepat daripada buruh laki-laki walaupun terkadang buruh laki-laki lebih cepat dan lebih besar tenaganya dalam bekerja, di lain pihak majikan juga sering dirugikan oleh buruh karena sering mengurangi waktu bekerja dan terkadang majikan juga merasa dirugikan oleh buruh dikarenakan tanaman ada yang rusak dan majikan tidak ada keberanian untuk menegor buruh, sebab buruh tersebut adalah tetangga dan tidak merasa enak hati.¹⁵

¹³ Tutik, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 11 November 2017.

¹⁴ Yunda, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 12 November 2017.

¹⁵ Sarjan, Pemilik Sawah/Majikan, Wawancara, Tanggal 12 November 2017.

Maka dari itu majikan tidak mampu menaikkan upah buruh tani karena hasil yang diperoleh majikan relatif rendah dan tidak menentu sehingga terkadang tidak mampu untuk menutup biaya produksi atau pengolahan sawah.¹⁶ Tetapi dalam hal ini, majikan tidak membedakan keahlian maupun kecepatan dalam bekerja dikarenakan sistem upah tersebut sudah umum terjadi di masyarakat.¹⁷

¹⁶ Ismiah, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 11 November 2017.

¹⁷ Jamal, Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 12 November 2017.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sistem Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Trimoharjo, pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan (*mu'ajir*) dengan buruh (*musta'jir*), karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Trimoharjo, upah mengupah yang dilakukan masyarakat Dusun Trimoharjo tidak ada akad yang mengikat, hanya dilakukan secara lisan atas dasar ikhlas sama ikhlas, suka sama suka dan saling percaya tidak terlalu formal. Majikan (*mu'ajir*) langsung mendatangi rumah buruh (*musta'jir*) untuk menanyakan, apakah buruh mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh majikan. Apabila buruh bersedia melakukan pekerjaan tersebut, maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi. Dalam perjanjian antara *mu'ajir* dan *musta'jir* tidak ada pemberitahuan bahwa upah antara laki-laki dan perempuan dibedakan, tetapi masyarakat setempat telah mengetahui sendiri, jika dalam pekerjaan tersebut terdapat perbedaan upah.

Sedangkan dalam pembayaran upah, upah buruh tani laki-laki lebih besar daripada upah yang didapat oleh buruh tani perempuan, karena dalam praktiknya buruh laki-laki mayoritas mempunyai tenaga yang lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaannya dibandingkan tenaga buruh perempuan, walaupun terkadang terdapat beberapa buruh perempuan yang mengerjakan pekerjaannya dengan cepat seperti yang dilakukan oleh buruh laki-laki.

Saat buruh melakukan pekerjaannya, terkadang diawasi oleh majikan untuk melihat proses pekerjaan buruh. Faktor-faktor terjadinya perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan disebabkan oleh:

1. Ketika majikan tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesakapatan dalam tata cara melakukan pekerjaannya dengan rapi, sehingga buruh terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap majikan.
2. Buruh tani perempuan terkadang datang terlambat dibandingkan dengan buruh tani laki-laki yang datang lebih awal sebelum jam kerja, sehingga hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dari hasil kerja buruh tani laki-laki.
3. Mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan.
4. Tanggung jawab buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

Hal ini yang menyebabkan majikan tidak dapat menyamakan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

Upah buruh laki-laki untuk kerja setengah hari mendapatkan upah Rp. 30.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 35.000,- tidak diberi makan. Sedangkan untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000,- diberi makan sekali di waktu siang dan Rp. 70.000,- tidak diberi makan. Sedangkan buruh perempuan Rp. 25.000,- dengan waktu kerja setengah hari (dari jam 07.00 WIB-11.00 WIB) dengan makan sekali di waktu siang. Apabila tidak diberi makan maka upahnya Rp. 30.000,-. Untuk kerja satu hari upahnya Rp. 50.000,- dengan makan sekali di waktu siang dan Rp. 60.000,- tidak diberi makan. Sistem upah tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat Dusun Trimoharjo. Sehingga dalam praktiknya sudah sama-sama diketahui baik oleh *mu'ajir* dan *musta'jir*. Diantara keduanya sudah sama-sama tahu risiko yang mungkin mereka terima.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Buruh Tani Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan

Menyewa barang atau mengupah pekerja (*ijarah*) dibolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan atau dari pekerjaan yang dihasilkan. Jika dalam akad sewa barang atau upah pekerja tidak disebutkan waktu pembayarannya, setelah barang selesai dimanfaatkan atau pekerja menyelesaikan pekerjaannya, biaya sewanya atau upah kerjanya harus segera dibayarkan. Kecuali apabila dalam akad sewa atau kontrak kerja dijelaskan batas waktu pembayaran. Akad sewa barang atau upah pekerja (*ijarah*) tidak gugur dengan meninggalnya salah satu pihak yang mengikat kontrak. Akad ini gugur (batal) ketika barang yang disewa mengalami kerusakan. Selanjutnya,

penyewa barang (dan pekerja yang diupah) tidak menanggung risiko atas kerusakan barang yang disewa (atau fasilitas dalam pekerjaannya) kecuali karena melampaui batas dalam penggunaannya.¹

Menurut hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan akad *al-ijarah ala al-'amal* adalah sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam, *ijarah* seperti ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Para pihak dalam *ijarah* yaitu *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan (majikan), sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja). Dalam fiqh muamalah, upah (*ijarah*) dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Berdasarkan ILO konvensi upah yang setara, 1951 (No.100) yaitu upah yang setara untuk jenis pekerjaan yang memiliki nilai yang setara berarti suatu standar upah yang baku tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, memberikan upah sebagai imbalan

¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Noura, 2017), h. 323.

dan honorarium baik dalam bentuk tunai maupun natura, melakukan penilaian terhadap pekerjaan secara obyektif berdasarkan isi dari pekerjaan tersebut.

... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: ... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.² (Q.S. Al-Baqarah (2):233)

Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan pada BAB III dan merujuk pada BAB II tentang dasar hukum upah mengupah dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, dapat dipaparkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Trimoharjo telah sesuai dengan hukum Islam dan setiap muamalah hukumnya *mubah*, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat, laki-laki lebih besar tanggungjawabnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. Seperti dalam hadist:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)³

² Departemen Agama RI, *Loc., Cit.*

³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Loc., Cit.*

Artinya: Dari Abu Said ra. bahwa Nabi Saw bersabda, “*Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya*”. (HR. Abdul Razzaq dalam hadist tersebut terdapat riwayat yang munqathi’. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadist maushul menurut dari jalan Abu Hanifah).

Apabila *mu’ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti ada istiadat (*‘urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama. Maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dan mempunyai kedudukan yang terhormat. Oleh karena itu, Al-qur’an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang bai dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁴ (QS. An-Nahl (16):97)

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh, antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing

⁴ Departemen Agama RI, *Loc., Cit.*

mempunyai peran. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh laki-laki, seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

(Adat itu dapat menjadi dasar hukum)

Adat istiadat ('urf) dapat dipakai disuatu kehidupan masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat tersebut.

الضَّرَرُ يُزَالُ

(Kemudharatan harus dihilangkan)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(Tidak boleh memberi mudharat dan membalas kemudharatan)

Konsepsi kaidah ini memeberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.⁵ Jika dalam sistem penetapan upah di Dusun Trimoharjo menggunakan adat istiadat yang tidak mempertimbangkan proses kerja dan hasil kerja para buruh tani laki-laki dan perempuan, maka hal ini akan merugikan bagi buruh tani dan dapat menimbulkan *kemudharatan*.

⁵ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 17.

Dengan demikian dalam perspektif Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT, dan diberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang terjadi di Dusun Trimoharjo adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan disebabkan oleh: Buruh tani terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian terhadap majikan. Buruh tani perempuan terkadang datang terlambat, sehingga hasil kerja buruh tani perempuan lebih sedikit dari hasil kerja buruh tani laki-laki. Mayoritas buruh tani laki-laki memiliki tenaga dan kecepatan dalam melakukan pekerjaan lebih besar dari buruh tani perempuan. Tanggung jawab buruh tani laki-laki lebih besar daripada buruh tani perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya.
2. Pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Trimoharjo telah sesuai dengan hukum Islam, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat, laki-laki lebih besar tanggung jawabnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. Apabila *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti ada istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan

masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh tani laki-laki dan perempuan sama. Maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena Al-qur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya. Maka hal ini akan merugikan bagi buruh tani dan dapat menimbulkan *kemudharatan*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan bagi masyarakat Dusun Trimoharjo khususnya dalam kerjasama mengontrak tenaga buruh tani adalah:

1. Masyarakat Dusun Trimoharjo yang mayoritas beragama Islam hendaklah lebih menjiwai dan mempraktekkan norma-norma hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, sebaiknya pemilik sawah/majikan mengawasi pekerjaan buruh di sawah dan sebelum melakukan perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dijelaskan aturan-aturan dalam melakukan pekerjaan.
3. Sistem pengupahan buruh, hendaknya penetapannya dirubah dari banyaknya waktu bekerja menjadi banyaknya hasil pekerjaan, dengan kata lain upahnya ditetapkan dengan sistem borongan sehingga lebih mencerminkan nilai keadilan harga kerja.

4. Kepada pemilik sawah/majikan dan buruh hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam pemenuhan hak buruh tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Hikmah, 2010.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, Cet. Ke-1, Semarang: Toha Putra, 1989.
- , *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XIV, Cet. Ke-1, Semarang: Toha Putra, 1987.
- , *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, Cet. Ke-1, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Anton Satria, “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam “Syarah Bulughul Maram”*, Jilid: 3, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, Bandung:

Jabal, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dewi, Gemala dan Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Eta, A. Reni, *Wanita di Tempat Kerja*, Jakarta: PT Grasindo, 2001.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Ke-15, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset*, Bandung: Alumni Bandung, 1986.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Konvensi-Konvensi ILO tentang Kesetaraan Gender di Dunia Kerja.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Moleong, Lexy L, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Cet. Ke-1, Bandung: PT Alma’arif, 1987.

——, *Fiqh Sunnah 5*, Cet. Ke-1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet. Ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Siti Nurhanik, “Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, Cet.Ke-1, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Yusanto, M.I. dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan majikan/pemberi pekerjaan

1. Bagaimana cara mencari buruh tani?
2. Ada berapa bentuk dan berapa jumlah upah yang dibayarkan?
3. Siapakah yang menetapkan upah?
4. Kapan pembayaran upah tersebut dilaksanakan?
5. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah?
6. Apakah ada kerja tambahan (ekstra) dan apakah diberikan upah tambahan?
7. Apakah biaya upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut anda?
8. Apakah saudara merasa dirugikan oleh buruh, kalau merasa dirugikan dalam hal bagaimana dan langkah apa yang saudara lakukan?

B. Wawancara dengan buruh tani

1. Apakah pendidikan formal terakhir anda?
2. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh tani?
3. Jenis pekerjaan apa yang saudara kerjakan?
4. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan alat? dan apabila menggunakan alat, siapa yang menyediakan alat tersebut?
5. Siapakah yang menetapkan upah?
6. Kapan pembayaran upah tersebut dilaksanakan?
7. Menurut saudara, dengan sistem pengupahan yang diberikan secara (harian, mingguan, borongan) apakah keberatan atau tidak?
8. Upah jenis apa yang saudara terima?
9. Berapa upah yang saudara terima?
10. Menurut saudara, dengan gaji yang saudara terima apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
11. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil)?
12. Menurut saudara, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan?

13. Sebelum masuk kerja, apakah ada tawar menawar upah atau buruh tani hanya mengikuti ketentuan dari majikan/pemberi pekerjaan saja?
14. Apakah majikan/pemberi pekerjaan selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?
15. Apakah tidak ada perasaan dirugikan oleh majikan/pemberi pekerjaan, kalau merasa dirugikan dalam hal bagaimana dan langkah apa yang saudara lakukan?
16. Apa yang menjadi dasar penghitungan upah?